



PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LINEA VICTORIA ADEN
 2. Jabatan : KEPALA DINAS
 3. NHK : 666219

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.671.800.000
1. Tanah Seluas 600 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN	Rp.	61.800.000
2. Tanah Seluas 1995 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI	Rp.	500.000.000
3. Tanah Seluas 990 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN	Rp.	300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 521 m2/258 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI	Rp.	560.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KOTA BITUNG , WARISAN	Rp.	200.000.000
6. Tanah Seluas 593 m2 di PULANG PISAU, HASIL SENDIRI	Rp.	50.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	540.480.000
1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP Tahun 1981, HASIL SENDIRI	Rp.	250.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	12.000.000
3. MOBIL, TOYOTA NEW RUSH MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	278.480.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	785.387.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	571.404.367



F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.569.071.367
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.569.071.367

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.